Subag Humas dan TU
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7

Bulan :

✓	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

MEDIA
MERCUSUAR

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	✓ 10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Entitas :

Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali Utara	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut

BPK kawal setoran PNBP

GOWA, MERCUSUAR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2016 tentang perubahan Tarif PNBP seperti STNK dan BPKB di lingkungan kepolisian. Menyikapi hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengawal setoran PNBP dari kenaikan tarif surat-surat kendaraan bermotor itu.

"Kita akan periksa pertambahan (pendapatan) Polri dan kegunaan PNBP yang sebagian besar kembali di mana uang negara itu masuk. Hasilnya akan diumumkan Juni nanti," ujar Ketua BPK RI Harry Azhar Aziz usai meresmikan Balai Diklat BPK di Kab. Gowa, Sulsel, Senin (9/1/2017).

Harry juga menegaskan lembaga yang dipimpinnya telah dipercaya di level internasional, seperti mengaudit Badan Atom Dunia dan akademi anti korupsi di Wina, Austria.

Sementara itu terkait peresmian Badan Diklat BPK di Gowa, mantan pimpinan Komisi IX DPR RI ini berharap para pegawai BPK di bagian timur Indonesia bisa lebih optimal menjalankan tugasnya memeriksa pengelolaan keuangan daerah yang bisa bermanfaat pada kemakmuran rakyat. Peresmian badan diklat ini dihadiri Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto serta beberapa kepala daerah di Sulsel.

Harry menambahkan, hingga saat ini baru tiga propinsi yang seluruh kabupaten/kotanya meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yakni Kalimantan Selatan, Gorontalo dan DI Yogyakarta. DTI